

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **Tutup Rangkaian Penyerahan LHP atas LKPD TA 2021, BPK Jateng Serahkan LHP pada Tujuh Pemerintah Daerah**

**Semarang, Jumat (27/05/22)** - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) kembali menggelar acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jateng kepada tujuh pemerintah daerah (pemda). Ketujuh pemda tersebut adalah Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Rembang, Pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

LHP atas LKPD TA 2021 diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Ayub Amali kepada ketua DPRD dan kepala daerah masing-masing pemda. Ketujuh pemerintah daerah tersebut memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Dalam sambutannya, Kalan BPK Perwakilan Provinsi Jateng menyampaikan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Standar pemeriksaan Laporan Keuangan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapannya. Pengujian dimaksud untuk menilai kewajaran penyajian saldo akun-akun, kecukupan pengungkapan informasi keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi, efektivitas desain dan implementasi system pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ayub Amali juga menyampaikan ucapan selamat kepada tujuh pemda yang memperoleh opini WTP tersebut. Ayub Amali juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemda yang telah mendukung kelancaran proses pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD TA 2021.

Dalam hal pemeriksaan LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam dua buah buku. Buku I memuat opini atas laporan keuangan dan Buku II memuat temuan terkait sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Ayub Amali menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan BPK, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Permasalahan tersebut antara lain dasar pembayaran iuran peserta asuransi kesehatan BPJS, pembayaran iuran kepesertaan program JKN, kekurangan volume pekerjaan, pengelolaan dana bergulir, serta pengelolaan Aset Tetap dan Barang Milik Daerah. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Penyerahan LHP atas LKPD TA 2021 kepada tujuh pemerintah daerah ini sekaligus menutup seluruh rangkaian penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Tengah TA 2021. (\*)

---

#### **Informasi lebih lanjut:**

Siti Rahmawati Arifah, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat

Telp. 024-8660826 Ext. 2013

Fax. 024-8660884

Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)